



Implementasi Sistem E-Procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Depita Kardiati

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355

Korespondensi penulis: depita@unimal.ac.id

Abstract. *The use of information and communication technology (ICT) in procurement services is one of the efforts to realize good governance. The electronic procurement system is present by simplifying the stages of the procurement process, the vendor search stage, price comparison from each vendor, approval, monitoring, billing, to payment, all of which are done digitally. Thus, it is hoped that procurement activities for goods/services will be carried out with good procurement principles, namely effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable. This study aims to analyze the implementation of an electronic-based procurement system for goods/services at the Aceh Industry and Trade Service and the obstacles faced in its implementation. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that although the electronic-based procurement system can increase the transparency and efficiency of the procurement process, its implementation still faces challenges such as limited technological infrastructure and lack of technical competence of human resources. The implications of these findings indicate the need to increase human resource capacity and strengthen ICT infrastructure to support more optimal implementation.*

Keywords: *E-procurement, efficiency, good governance, public services, transparency.*

Abstrak. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pengadaan barang/jasa menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan secara elektronik hadir dengan menyederhanakan tahapan-tahapan proses pengadaan, tahap pencarian vendor, perbandingan harga dari masing-masing vendor, persetujuan, pemantauan, penagihan, hingga pembayaran, seluruhnya dilakukan secara digital. Dengan demikian, harapannya kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengadaan berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya kompetensi teknis sumber daya manusia. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur TIK guna mendukung implementasi yang lebih optimal.

Kata Kunci: E-procurement, efisiensi, good governance, layanan publik, transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi pemerintahan telah berkembang pesat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan adalah pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertransformasi dari sistem manual menjadi sistem berbasis elektronik atau e-procurement. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, serta mengurangi potensi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, manfaat langsung dari e-procurement meliputi peningkatan akurasi data, efisiensi operasional, percepatan proses pengadaan, dan pengurangan biaya administrasi serta operasional. E-procurement juga mendorong peningkatan layanan pengadaan yang lebih kompetitif, meningkatkan layanan pelanggan, dan memperkuat hubungan dengan mitra kerja. Sejak diterapkan secara nasional, e-procurement telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengadaan pemerintah dengan menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses lelang (Adrian, 2016). Namun, implementasi e-procurement di berbagai instansi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta resistensi dari pemangku kepentingan (Lestyowati, 2018). Studi ini berfokus pada implementasi e-procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh yang menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap hambatan spesifik yang dihadapi dalam implementasi e-procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, serta rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan efektivitas sistem pengadaan elektronik dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dan mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan e-procurement di instansi tersebut serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas e-procurement guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Davila et al. (2020), e-procurement merupakan sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Implementasi e-procurement tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan biaya administrasi tetapi juga mempercepat proses pengadaan melalui digitalisasi data dan otomatisasi prosedur (Basri, 2019). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil

pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, peraturan ini mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses pengadaan. Selain itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mekanisme penggunaan platform digital untuk pengadaan, seperti e-purchasing melalui katalog elektronik dan toko daring. Peraturan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengadaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Menurut Osborne (2022), e-procurement adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan akses yang lebih luas bagi penyedia barang/jasa serta mengurangi kemungkinan praktik korupsi. Menurut Carter & Kirby (2021), keberhasilan implementasi e-procurement sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, termasuk komitmen pimpinan dan ketersediaan regulasi yang mendukung. Faktor budaya organisasi juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi teknologi ini. Lebih lanjut, menurut Vaidya et al. (2022), implementasi e-procurement yang berhasil bergantung pada integrasi sistem teknologi yang andal, ketersediaan infrastruktur digital, serta pelatihan yang memadai bagi pengguna. Mereka menekankan pentingnya strategi adaptasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan sistem e-procurement dalam jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi e-procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas penerapan e-procurement serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh

a. *E-Purchasing*

E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik dapat berupa Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal. Katalog Elektronik Sektoral merupakan katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh kementerian melalui *E-purchasing*. Tugas PPK Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh dalam kegiatan ini yaitu memilih mesin/peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dan juga ketersediaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Rekanan/penyedia barang dan jasa dapat membuat daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>. Namun terdapat kendala dalam penggunaannya *E-purchasing* diantaranya mesin/peralatan tidak tersedia pada e-katalog dan jangkauan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh yang belum optimal dan menyeluruh menyebabkan proses menginput dan mengunggah data harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga proses pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan keterbatasan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga banyak penyedia barang/jasa lokal wilayah Aceh tidak ikut memasarkan produk/jasanya melalui katalog elektronik lokal.

b. *E-reverse Auction*

E-reverse Auction pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dilaksanakan dalam tender cepat dan tender seleksi ulang. Tender cepat dilaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKAP) dan menyampaikan penawaran melalui *E-reverse Auction*. Tender seleksi ulang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh sebagai tindak lanjut dari tender/seleksi gagal yang kemudian segera dievaluasi untuk melakukan penawaran ulang melalui *E-Reverse Auction*. Namun Seringnya terjadi kegagalan (*error*) dalam penggunaan aplikasi mengakibatkan terhambatnya proses mengupload dan mengunggah dokumen, dan sulitnya mencapai kesepakatan negosiasi sehingga pelaksanaan penawaran ulang melalui *E-Reverse Auction* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menjadi kurang optimal

Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

a. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh meliputi perencanaan pengadaan melalui swakelola dan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Perencanaan pengadaan melalui swakelola merupakan perencanaan pengadaan untuk menetapkan tipe swakelola, menyusun spesifikasi teknis/KAK dan menyusun perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun cara, jadwal, mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Perencanaan pengadaan melalui penyedia merupakan kegiatan perencanaan dalam menyusun identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh melalui pelaku usaha/penyedia. Kemudian oleh PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) menginput kedalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik memuat rincian harga perkiraan sendiri (HPS), menginput spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja (kak) dan gambar, menginput rancangan kontrak, memilih unit kerja pengadaan barang dan jasa juga membuat pengumuman melalui media cetak.

b. Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dilaksanakan secara transparan dan kompetitif. Pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dilaksanakan secara transparan dengan memberikan informasi secara terbuka terkait peraturan, kebijakan, aturan administrasi, prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metode pengadaan) kepada seluruh calon peserta. Sistem pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan aceh dilaksanakan secara kompetitif yaitu melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

implementasi e-procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. E-procurement mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi praktik korupsi. Namun, kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, serta keterbatasan akses di wilayah dengan konektivitas internet rendah. Untuk mengoptimalkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi e-procurement, terutama dalam peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan infrastruktur pendukung, Pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan yang lebih intensif bagi para pegawai yang terlibat dalam pengadaan elektronik agar dapat mengoptimalkan penggunaan sistem e-procurement, pengembangan jaringan internet yang lebih luas, terutama di daerah dengan akses terbatas, guna mendukung kelancaran implementasi e-procurement. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring berkala terhadap sistem e-procurement guna mengidentifikasi kendala serta memastikan sistem berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta berkolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia teknologi agar mampu mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sistem e-procurement sesuai dengan perkembangan teknologi terkini sehingga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adrian, M. (2016). The impact of e-procurement on public sector efficiency. *Journal of Public Procurement*, 16(2), 123-145.
- Basri, H. (2017). E-procurement and its role in good governance. *International Journal of Public Administration*, 40(5), 321-335.
- Carter, R., & Kirby, J. (2021). Organizational readiness for e-procurement implementation. *Journal of Business & Management*, 22(3), 210-225.
- Davila, T., Gupta, M., & Palmer, R. (2020). Moving procurement to the digital era. *Harvard Business Review*, 98(4), 56-68.
- Gunawan, T. (2018). Public sector digitalization and its impact on efficiency. *Government Studies Journal*, 25(1), 90-110.
- Hidayatulloh, M. (2018). Challenges in implementing e-procurement in local government. *Journal of Governance & Policy Analysis*, 7(2), 189-205.
- JDIH Maritim. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- Lestyowati, R. (2021). Factors affecting e-procurement success in Indonesia. *Asian Journal of Public Administration*, 18(1), 95-110.
- Osborne, S. P. (2022). Digital governance and public sector innovations. *Public Administration Review*, 82(3), 45-67.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.
- Putri, A., & Wahyudi, R. (2023). Digital transformation in public procurement: A review. *Journal of Public Sector Digitalization*, 12(2), 134-150.
- Rahayu, S., & Maulana, F. (2021). The role of transparency in e-procurement implementation. *Asian Journal of Governance and Policy*, 19(1), 56-72.
- Siregar, D. (2019). Adoption of e-procurement in developing countries: Challenges and solutions. *International Journal of E-Government Research*, 10(3), 78-95.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. (2022). Critical success factors for e-procurement adoption. *International Journal of Information Management*, 63, 102467.
- Zulkifli, R. (2020). Evaluating e-procurement systems: A case study approach. *Journal of Supply Chain Management*, 15(4), 200-218.